eISSN 3090-6431 & pISSN 3090-644X
SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA
Vol. 1, No. 3, Tahun 2025
doi.org/10.63822/5ym3dg50
Hal. 396-412
Homepage https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud

Kepemimpinan Berbasis Nilai: Telaah atas *The Purchase of Slaves* Kai Kaus dan *Advice to Governors* Karya Nizam al-Mulk dalam Perspektif Budaya Persia

Muhammad Fadhlurrahman[1*], Nurholis[2], Ismiyanti Agustina[3], Alya Hasya Azqia[4]
Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Gunung Djati Bandung[1,2,3,4]

*Email Korespodensi: mfadhlurrahman96@gmail.com

Diterima: 25-07-2025 | Disetujui: 31-07-2025 | Diterbitkan: 02-08-2025

ABSTRACT

This article analyzes two important works in the classical Islamic political literature genre, mirrors for princes, namely Nizam al-Mulk Siyasatnama and Qabusnameh. It focuses on the sections Advice to Governors in Siyasatnama and The Purchase of Slaves in Qabusnameh. This study aims to identify and compare the political, ethical and managerial values contained therein. Siyasatnama offers comprehensive guidance on ideal governance, emphasizing the principles of justice and effective state management. Meanwhile, Qabusnameh provides more personalized and practical advice regarding the selection of slaves based on physical characteristics and temperament. Through a comparative approach, this article highlights the differences in the focus and scale of advice in the two works, where Siyasatnama is oriented towards politics and the welfare of the state at large, while Qabusnameh emphasizes more on interpersonal relationships within the social context of its time. Nonetheless, both provide valuable insights into political thought and leadership ethics in the classical Islamic tradition.

Keywords*: Classical Islam, mirror for princes, politics, Siyasatnama, Qabusnameh.*

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis dua karya penting dalam genre sastra politik Islam klasik, mirror for princes, yaitu Siyasatnama karya Nizam al-Mulk dan Qabusnameh. Dengan fokus pada bagian Advice to Governors dalam Siyasatnama dan The Purchase of Slaves dalam Qabusnameh. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan membandingkan nilai-nilai politik, etika, dan manajerial yang terkandung di dalamnya. Siyasatnama menawarkan panduan komprehensif tentang tata kelola pemerintahan yang ideal, menekankan prinsip-prinsip keadilan dan manajemen negara yang efektif. Sementara itu, Qabus nameh memberikan nasihat yang lebih personal dan praktis mengenai pemilihan budak berdasarkan karakteristik fisik dan temperamen. Melalui pendekatan komparatif, artikel ini menyoroti perbedaan fokus dan skala nasihat dalam kedua karya, di mana Siyasat nameh berorientasi pada politik dan kesejahteraan negara secara luas, sedangkan Qabus nameh lebih menekankan pada hubungan interpersonal dalam konteks sosial pada masanya. Meskipun demikian, keduanya memberikan wawasan berharga tentang pemikiran politik dan etika kepemimpinan dalam tradisi Islam klasik.

Katakunci: Islam klasik, mirror for princes, politik, Siyasat nameh, Qabus nameh

Copyright © 2025 The Author(s) This article is distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Muhammad Fadhlurrahman, Nurholis, N., Ismiyanti Agustina, & Alya Hasya Azqia. (2025). Kepemimpinan Berbasis Nilai: Telaah atas The Purchase of Slaves Kai Kaus dan Advice to Governors Karya Nizam al-Mulk dalam Perspektif Budaya Persia. Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya, 1(3), 396-412. https://doi.org/10.63822/5ym3dg50

PENDAHULUAN

Mirror for princes atau *specula principum* adalah genre sastra politik Islam yang memberikan panduan moral dan administratif bagi para penguasa. Berasal dari tradisi sastra Adab Persia yang dipengaruhi oleh ajaran *Zoroastrianisme*, genre ini menekankan bahwa seorang raja adalah wakil Tuhan di bumi dan memiliki tanggung jawab moral untuk berlaku adil dan bijaksana. Konsep ini kemudian diadopsi dan diselaraskan dengan ajaran Islam selama era Abbasiyah, lalu menyebar ke India dan dunia Melayu melalui hubungan perdagangan dan penyebaran Islam(Abdullah, 2020).

Artikel ini menganalisis dua karya penting dalam genre sastra politik Islam klasik, yaitu *Siyasatnama* karya Nizam al-Mulk dan *Qabusnameh* karya Kai Kaus. Kedua karya ini termasuk dalam kategori *mirror for princes*, yang berisi nasihat bagi para pemimpin agar dapat menjalankan kekuasaan dengan bijak dan adil. Penelitian ini secara khusus berfokus pada bagian *Advice to Governors* dalam *Siyasatnama* dan *The Purchase of Slaves* dalam *Qabusnameh*. Bagian pertama mengulas prinsip-prinsip dasar pemerintahan dan etika kepemimpinan, sementara bagian kedua menyoroti aspek sosial dan etika dalam hubungan antara pemilik dan budak.

Dalam kerangka penelitian ini, terdapat tiga rumusan masalah utama yang ingin dijawab. Pertama, bagaimana nilai-nilai politik, etika, dan manajerial digambarkan dalam bagian *Advice to Governors* pada *Siyasatnama*. Kedua, bagaimana nilai-nilai politik, etika, dan manajerial diinterpretasikan dari bagian *The Purchase of Slaves* dalam *Qabusnameh*. Terakhir, apa perbedaan fokus dan skala nasihat antara *Siyasatnama* dan *Qabusnameh* dalam konteks nilai-nilai politik, dan etika kepemimpinan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan membandingkan nilai-nilai politik, etika, dan manajerial yang terkandung dalam *Siyasatnama* dan *Qabusnameh*. Selain itu, melalui pendekatan komparatif, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali relevansi nilai-nilai tersebut dengan teori kepemimpinan modern.

KAJIAN PUSTAKA

Secara teoritis, penelitian ini bertumpu pada beberapa kerangka konseptual untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai nilai-nilai kepemimpinan dalam teks sastra politik islam klasik. Teori *mirror for princes* digunakan sebagai landasan utama untuk menjelaskan fungsi nasihat dalam teks sebagai visi serta etika sebuah kepemimpinan. Genre ini berakar dari tradisi Persia dan dihubungkan ke dalam wacana Islam selama masa Abbasiyah, yang menempatkan pemimpin sebagai figur moral dan administratif yang bertanggung jawab secara spiritual dan sosial.

Penelitian ini juga menerapkan prinsip etika kepemimpinan islam, seperti *adl* (keadilan), *amanah* (integritas), *syura (*musyawarah) dan pencarian ilmu (*thalab al-ilm)*, untuk mengevaluasi sejauh mana isi dari *siyasatnama* dan *Qabusnameh* mencerminkan nilai-nilai normatif dalam tradisi Islam. Kerangka teori manajemen modern dijadikan alat analisis untuk membandingkan relevansi nilai-nilai klasik dengan praktik kepemimpinan masa kini. Konsep-konsep seperti struktur organisasi, sistem perekrutan berbasis kompetensi, fungsi pengawasan, dan pengambilan

keputusan secara kolektif dipakai untuk mengkaji kesesuaian prinsip dalam kedua karya dengan konteks manajerial modern.

Dalam melakukan analisis pada bagian *The purchase of slaves*, digunakan pendekatan postkolonial dengan menerapkan teori *governmentality* dari Michael Foucalt. Pendekatan ini membuka ruang untuk menafsirkan teks secara kritis, terutama dalam hal representasi tubuh, etnisitas dan relasi kekuasaan.

Dengan menerapkan pendekatan teoritis yang interdisipliner ini, penelitian berupaya menjelaskan bagaimana dua karya klasik tersebut menyampaikan konsep kepemimpinan yang tidak hanya relevan secara historis, namun juga memberikan refleksi penting bagi pengembangan nilai etika dan manajerial dalam praktik kepemimpinan saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif untuk menganalisis isi dua karya literatur Islam abad pertengahan, yaitu *Siyasat nameh* karya Nizam al-Mulk dan *Qabus Nameh* karya Kai Kaus. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menggali secara mendalam makna, pesan, serta nilai-nilai etis dan politis yang terkandung dalam masing-masing teks, khususnya dalam topik yang berkaitan dengan nasihat pemerintahan dan strategi pemilihan budak.

Penelitian ini memanfaatkan dua teks utama sastra politik Islam Klasik yang masuk dalam kategori *mirror for princes*, yaitu *Siyasatnama* karya Nizam Al-Mulk dan *Qabusnameh* karya Kai Kaus. Analisis yang dilakukan berfokus secara khusus pada bagian *Advice to Governors* dan *The Purchase of Slave* dalam *Qabusnamaeh.* Kedua bagian tersebut dipilih karena memuat dimensi nilai politik, etika, dan manajerial yang mempresentasikan corak kepemimpan pada masanya.

Sumber data primer berasal dari versi terjemahan berbahasa Inggris yang tercantum dalam buku *Anthology of Islamic literature* yang disunting oleh James Kritzeck. Buku ini menyajikan penggalan-penggalan penting dari kedua karya tersebut dengan pendekatan yang akademik dan kontekstual. Untuk menunjang kajian, penelitian ini juga mengambil dari berbagai sumber sekunder berupa Jurnal ilmiah, serta sumber literatur lainnya yang berkaitan dengan studi budaya dan politik dalam konteks islam klasik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup pembacaan dan analisis kritis terhadap teks-teks utama, serta pencarian referensi pendukung yang memperkaya interpretasi terhadap makna, konteks sejarah dan relevansi isi teks terhadap wacana kepemimpinan kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Nasihat Politik Pemerintahan dalam *Siyasat Nameh*

A. Konteks Historis dan Tujuan Penulisan *Siyasat Nameh*

Nizam al-Mulk adalah penulis Siyasat nameh (Siyar al-Muluk) yang terkenal. Masa awal pemerintahan dinasti Seljuk di wilayah timur dunia Islam merupakan periode yang penuh gejolak.

Kekuasaan atas sebagian besar wilayah tersebut berada di tangan para pemimpin suku prajurit yang memerintah melalui para budaknya, bekerja sama dengan pemilik tanah sebelumnya. Namun, keberuntungan besar menghampiri kesultanan Seljuk di bawah kepemimpinan Sultan Alp Arslan dan putranya, Sultan Malikshah. Mereka mengangkat seorang wazir asal Persia bernama Nizam al-Mulk, yang terbukti sangat cakap dalam menghadapi situasi yang rumit ini.

Nizam al-Mulk mulai melakukan reformasi administrasi dengan tujuan memperkuat kekuasaan dan wibawa pusat kerajaan. Seorang penulis pada masa itu bahkan menyatakan bahwa selama dua puluh tahun pemerintahan Malik Syah, Nizam al-Mulk memegang kendali penuh atas kekuasaan, sementara sultan hanya bertakhta atau menikmati kegiatan berburu. Dia memberikan nasihat tentang bagaimana para penguasa berperilaku dengan contoh-contoh dari raja-raja terdahulu. Terkadang ia memberikan contoh yang buruk dan terkadang memberikan contoh yang baik. Dalam hal berlaku adil, beliau menasehati para penguasa untuk mendengarkan rakyatnya. Para raja harus mendengarkan dengan seksama perkataan rakyatnya dengan telinganya sendiri. Jika rakyat mendengarkan perkataan atau solusi dari penguasa tentang keadilan, maka tidak akan ada yang berani melakukan kezaliman.

Sebagai seorang Persia yang berbudaya, Nizam al-Mulk berupaya untuk menghaluskan karakter para penguasa Turki, sekaligus melayani kepentingan nasionalisme Persia. Ia melakukan berbagai reformasi dan mendirikan banyak lembaga pendidikan. Meskipun telah mengabdi selama tiga puluh tahun, ia menyadari bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Untungnya, Ia memiliki sebuah karya penting yang menggambarkan visi idealnya, yaitu Kitab Pemerintahan atau Siyasatnama. Buku ini ditulis dalam bentuk nasihat kepada para gubernur atas permintaan Sultan Malik Syah.

Karya ini memiliki nilai yang lebih dari sekadar nilai sastranya, meskipun nilai sastranya sendiri sangat tinggi, sebagaimana tercermin dalam *Anthology of Islamic Literature* yang diedit oleh James Kritzek. Pesan yang disampaikan dalam buku ini sangat mendalam dan penuh semangat. Salah seorang penulis awal mencatat pentingnya buku ini, menyatakan bahwa "Tidak ada raja atau kaisar yang bisa mengabaikan dan tidak mengetahui buku ini, terutama pada masa sekarang ini." Tujuan utama penulisan Siyasatnameh adalah untuk memberikan panduan praktis dan moral kepada para penguasa dan pejabat tinggi negara, dengan harapan bahwa mereka dapat memerintah secara adil, bijaksana, dan religius. Nizam al-Mulk menyusun 50 bab yang berisi nasihat, kisah sejarah, kutipan ayat Al-Qur'an dan hadis, serta contoh-contoh empiris dari masa lalu yang dimaksudkan untuk menunjukkan jalan pemerintahan yang benar dan efektif(Kuşakcı & İyigün, 2017).

Penulis yang sama juga mencatat bahwa Nizam al-Mulk merasa perlu merevisi karyanya dan menambahkan sebelas bab baru yang membahas tentang musuh-musuh negara. Tindakan ini ternyata menjadi sebuah ramalan yang tragis, karena Nizam al-Mulk segera setelah itu dibunuh oleh salah satu musuh utama yang telah ia sebutkan.

B. Prinsip-prinsip Fundamental dalam Advice of Governors

Berdasarkan hasil analisis terhadap teks *Advice to Governors* dalam *Siyasat Nameh* karya Nizam al-Mulk, sebagaimana dikaji melalui Anthology of Islamic Literature yang disusun oleh James Kritzeck dan diterjemahkan oleh Hubert Darke, terdapat sejumlah prinsip fundamental yang ditujukan kepada para pejabat pemerintahan. Nasihat-nasihat ini, sebagaimana tercermin dalam pemikiran Nizam al-Mulk,

seorang wazir berpengaruh pada masa dinasti Seljuk, memberikan panduan komprehensif mengenai tata kelola pemerintahan yang ideal. Beberapa prinsip utama yang ditekankan meliputi.

1. Keadilan sebagai Dasar Pemerintahan

Dalam pemikiran Nizam al-Mulk, keadilan (*'adl*) tidak hanya merupakan sebuah prinsip normatif dalam hukum, melainkan juga menjadi ruh kehidupan politik dan dasar eksistensial bagi keberlangsungan negara. Ia menegaskan bahwa "negara dapat bertahan tanpa agama, tetapi tidak dapat bertahan dengan adanya penindasan". Dengan kata lain, meskipun keberagamaan dapat bervariasi di antara warganegara, keadilan mutlak harus menjadi prinsip kolektif yang menjamin keteraturan sosial dan loyalitas politik.

Nizam memandang negara sebagai entitas moral, sosial, dan spiritual yang tidak netral terhadap nilai. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban teologis dan etis untuk menyebarkan keadilan, yang baginya merupakan pengejawantahan langsung dari kehendak Tuhan di muka bumi. Dalam *Siyasat Nameh*, ia menyatakan bahwa seorang penguasa harus memelihara keadilan tidak hanya melalui kebijakan publik, tetapi juga dengan membangun sistem peradilan yang bersih, menjauhkan para koruptor dari jabatan, dan mendengarkan keluhan rakyat secara langsung tanpa perantara.

Keadilan juga memiliki implikasi ekonomi dalam kerangka pemikiran Nizam. Ketika terjadi masa krisis selama tujuh tahun, raja yang baik digambarkan sebagai sosok yang menyuruh bagian keuangan menjual seluruh cadangan padi dan mendistribusikannya kepada rakyat, sehingga tidak seorang pun meninggal karena kelaparan. Ini adalah bentuk keadilan distributif yang menjadi tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak dasar rakyat.

Dengan mengusung keadilan sebagai prinsip sentral negara, Nizam menempatkan dirinya dalam tradisi besar pemikir Muslim seperti al-Mawardi dan Abu Ya'la, namun ia melampaui mereka dengan menjadikan keadilan sebagai pengganti kedudukan agama dalam konteks legitimasi kekuasaan. Ini adalah gagasan yang visioner dan sangat progresif untuk konteks abad ke-11.

2. Pentingnya Menteri yang Bijaksana

Wazir (menteri utama) memiliki peran strategis sebagai penopang kekuasaan raja. Nizam al-Mulk menekankan bahwa kualitas kepemimpinan sangat ditentukan oleh kapasitas dan integritas wazir. Ia bahkan menegaskan bahwa "kestabilan mahkota kerajaan terikat pada tinta seorang wazir," menggambarkan betapa pentingnya peran penasihat dalam kelangsungan negara.

Wazir dalam sistem pemerintahan Islam klasik memegang posisi yang sangat sentral, dan dalam pandangan Nizam al-Mulk, wazir adalah representasi nyata dari kualitas pemerintahan itu sendiri. Seorang wazir yang saleh, bijaksana, dan cakap akan mencerminkan keunggulan rajanya, sebaliknya wazir yang buruk akan menjadi sumber kehancuran bagi negara. Nizam menyatakan: *"Apabila wazir itu mempunyai karakter yang baik dan keputusan yang benar, maka kerajaan akan makmur, tentara dan rakyat akan puas, dan raja terbebas dari kegelisahan"*.

Nizam secara tegas menetapkan syarat bagi wazir ideal, yaitu harus berasal dari mazhab Sunni (terutama Syafi'i atau Hanafi), memiliki integritas moral tinggi, efisien dalam bekerja, cerdas dalam berpikir, lihai dalam menulis, dan setia kepada raja. Ia menolak pengangkatan wazir yang berasal dari kalangan non-Muslim atau mereka yang memiliki kecenderungan bid'ah, karena bisa mengarah pada penindasan terhadap umat Islam.

Wazir juga berfungsi sebagai penentu arah kebijakan negara. Dalam banyak hal, wazir bahkan lebih berperan daripada sultan dalam mengatur administrasi negara. Nizam sendiri tidak hanya menjadi penasehat, tetapi juga menjadi arsitek sistem pemerintahan Seljuk, menyusun jaringan birokrasi, sistem pajak, pendidikan, dan militer.

Lebih lanjut, ia memperingatkan bahwa buruknya akhlak wazir akan menular ke seluruh jajaran pemerintahan. Karena itu, wazir bukan hanya seorang administrator, tetapi juga figur teladan. *"Wazir adalah kepala dari seluruh pegawai atau pejabat dalam negara,"* tulis Nizam, *"jika ia korup, maka seluruh sistem akan rusak"*.

3. Pengawasan dan Sistem Intelijen

Penguasa dianjurkan untuk memiliki jaringan informasi yang kuat, termasuk sistem intelijen yang bertugas mengawasi para pejabat dan menyerap aspirasi serta keluhan rakyat. Langkah ini dimaksudkan untuk mendeteksi potensi penyimpangan, mencegah korupsi, dan menjaga keamanan nasional dari dalam.

Dalam sistem pemerintahan ideal menurut Nizam al-Mulk, pengawasan bukanlah praktik represif, melainkan langkah strategis untuk menjaga keadilan dan stabilitas. Ia percaya bahwa raja tidak boleh bersandar pada laporan resmi semata, karena laporan tersebut seringkali disesuaikan untuk menyenangkan atasan. Maka, dibutuhkan agen-agen intelijen yang mampu menyampaikan informasi langsung dari lapangan dengan objektif.

Nizam menguraikan bahwa tugas agen-agen ini sangat kompleks. Mereka harus menyamar sebagai pedagang, pelancong, sufi, bahkan pengemis, agar tidak dicurigai, dan mereka bertugas memeriksa aktivitas para pemeras serta memastikan tidak ada bentuk penindasan yang terjadi di masyarakat.

Ia menulis bahwa tanpa pengawasan semacam ini, rakyat akan menganggap rajanya lalai, tidak peduli, dan akhirnya akan menyebutnya sebagai tiran. Karena itu, intelijen harus diangkat dari kalangan yang tidak memiliki kepentingan pribadi dan digaji secara tetap dari kas negara untuk menjamin integritasnya.

Selain di dalam negeri, Nizam juga menganjurkan agar raja menyebarkan mata-mata hingga perbatasan negara. Tujuannya adalah untuk menangkal rencana pemberontakan atau kudeta yang mungkin disusun oleh gubernur atau jenderal daerah. Ia mencatat bahwa berkat sistem mata-mata yang tersebar luas, beberapa upaya subversif terhadap Dinasti Saljuk berhasil digagalkan sejak dini.

Sistem ini menunjukkan betapa dalamnya pemahaman Nizam terhadap pentingnya informasi dalam menjalankan pemerintahan. Bagi Nizam, intelijen bukan sekadar alat pengawasan, melainkan pilar penegak keadilan dan penjaga stabilitas negara.

4. Pemeliharaan Tentara yang Kuat dan Loyal

Tentara merupakan pilar kekuatan negara. Nizam al-Mulk menyarankan agar tentara dibayar secara tepat waktu dan diperlakukan dengan baik, karena kesejahteraan dan loyalitas mereka menentukan keamanan negara dan kelangsungan kekuasaan.

Menurut Nizam al-Mulk, kekuatan militer merupakan faktor penting dalam kesinambungan negara. Dia adalah seorang birokrat sipil dan ulama, tetapi Nizam tidak pernah meremehkan peran militer dalam

menjaga stabilitas politik dan menjaga wilayah ancaman internal dan eksternal. Dia mengatakan bahwa keputusan yang adil lebih baik daripada pasukan militer besar, stabilitas nasional.

Nizam mengkritik ketergantungan eksklusif pada satu kelompok militer atau suku tertentu。 Ia menilai bahwa jika suatu pasukan hanya terdiri dari satu etnis, seperti hanya Turki saja atau hanya Arab saja, maka hal itu akan menyebabkan kesombongan kelompok, kecemburuan sosial, dan bahkan pemberontakan.Karena alasan ini, ia mengusulkan untuk mengumpulkan tentara untuk berbagai latar belakang etnis, seperti Krasani, Dilami, Torkie, Arab, dan bahkan Hindu dan Georgia, seperti yang dilakukan Sultan Mahmoud Gaznawi.

Keberagaman ini menciptakan kompetisi sehat, kebanggaan kolektif, serta menghilangkan dominasi satu kelompok dalam struktur kekuatan. Nizam juga memberikan perhatian besar terhadap logistik dan kesejahteraan tentara. Ia mengingatkan agar tentara tidak dibiarkan tanpa upah karena hal itu akan memicu pembangkangan atau perampokan terhadap rakyat.

Lebih jauh, sistem iqta atau pemberian tanah kepada tentara sebagai kompensasi telah digunakan secara luas atas inisiatifnya. Ini bukan hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga memperkuat loyalitas prajurit terhadap negara. Dia mendorong militer untuk memiliki disiplin tinggi untuk mencegahnya terlibat dalam politik.

5. Manajemen Keuangan yang Hati-Hati

Administrasi fiskal yang adil dan bijak menjadi fokus utama dalam *Siyasat Nameh*. Pengumpulan pajak harus dilakukan secara adil dan tidak membebani rakyat, sementara belanja negara diarahkan untuk kepentingan publik serta menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran.

Manajemen keuangan adalah salah satu kolom sehat negara, dan Nizam al-Mark sepenuhnya menyadari hal ini. Dalam Siyasat Nameh, ia memberi perhatian besar pada perpajakan dan sistem keuangan.

Nizam memberikan panduan rinci mengenai pengangkatan petugas pajak. Mereka tidak boleh berasal dari kalangan yang korup atau opresif. Mereka wajib memperlakukan rakyat dengan sopan dan menarik pajak hanya dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Jika Anda melanggar, Anda harus mengembalikan properti yang sangat baik kepada orang-orang, dan para pejabat akan diganti.

Contoh paling menonjol dari manajemen fiskal yang adil terjadi saat masa paceklik tujuh tahun Nizam mencatat bahwa berkat kebijakan raja yang adil, seluruh persediaan padi kerajaan dijual dan hasilnya disalurkan kepada rakyat secara sosial. Tidak seorang pun mati kelaparan, dan seluruh warga mendapat jaminan pangan dari negara.Ini menunjukkan betapa pentingnya peran pajak dalam distribusi kekayaan kolektif.

Nizam juga memperkenalkan sistem audit (pengawasan) yang kuat untuk mencegah kebocoran anggaran Ia menyarankan agar semua pejabat keuangan diperiksa secara berkala, dan bahwa pencatatan anggaran harus diawasi langsung oleh diwan (kantor pusat). Hal ini menandakan bahwa gagasan good governance sudah sangat berkembang dalam pikirannya.

6. Promosi Ilmu Pengetahuan dan Agama

Dalam upaya membangun peradaban yang kuat, Nizam Al-Mulk mendorong pendirian madrasah sebagai pusat pengajaran ilmu pengetahuan dan penyebaran nilai-nilai Islam. Madrasah Nizamiyyah yang didirikannya menjadi teladan lembaga pendidikan tinggi di dunia Islam.

Salah satu warisan paling monumental dari Nizam al-Mark adalah pendirian Nizamiya Madrasa, jaringan madrasa tinggi pertama dalam sejarah dunia Islam. Bagi Nizam, pendidikan bukan hanya sarana pembelajaran, tetapi juga cara untuk membentuk peradaban, tantangan legitimasi politik dan mempertahankan ortodoksi Islam.Nizam meyakini bahwa kekuatan politik yang tidak ditopang oleh kekuatan ilmu akan rapuh.

Oleh sebab itu, ia mendorong berdirinya madrasah yang menyebarkan mazhab Sunni (Syafi'i dan Hanafi), guna melawan pengaruh sekte-sekte ekstrem seperti Batiniyah dan Ismailiyah. Dia juga menulis bahwa para sarjana yang berpendidikan adalah tulang punggung moral bangsa dan dukungan untuk birokrasi negara.

Program pendidikan di Madrasah Nizamiyyah meliputi ilmu fiqh, kalam, tafsir, hadits, serta administrasi pemerintahan. Para siswa yang lulus dari institusi ini tidak hanya menjadi ulama, tetapi juga sekretaris negara, hakim, guru, bahkan wazir. Dengan demikian, pendidikan menjadi alat integrasi sosial dan pembentukan elit birokratik yang loyal terhadap negara dan agama.

Ia juga menegaskan bahwa negara wajib membiayai pendidikan rakyatnya, terutama mereka yang cerdas tetapi miskin. Selain madrasah, Nizam juga membentuk sistem beasiswa dan dana sosial, serta menyediakan akomodasi untuk pelajar yang menuntut ilmu. Ini menjadikan sistem pendidikan Nizam sangat inklusif dan berorientasi jangka panjang.

7. Hubungan Baik dengan Rakyat

Seorang pemimpin hendaknya dekat dengan rakyat, peka terhadap keluhan mereka, dan bersedia mendengarkan secara langsung tanpa perantara. Kesejahteraan rakyat dinilai sebagai faktor utama kestabilan dan legitimasi kekuasaan.

Nizam al-Mulk menekankan pentingnya kedekatan antara raja dan rakyat sebagai fondasi dari stabilitas politik dan legitimasi kekuasaan. Bagi Nizam, seorang pemimpin tidak boleh terisolasi dalam istana dan bergantung sepenuhnya pada laporan para pejabat atau wazir. Justru, ia harus membuka pintu seluas-luasnya untuk mendengar keluhan rakyat secara langsung.

Dalam Siyasat Nameh, Nizam menulis bahwa raja harus turun ke tengah masyarakat, memperhatikan nasib kaum miskin dan tertindas, serta tidak menciptakan jarak sosial yang memisahkan penguasa dari yang dikuasai. Rakyat, menurutnya, adalah penyokong doa yang menopang kekuasaan; negara yang dicintai rakyatnya akan langgeng, sedangkan negara yang ditakuti atau dibenci akan cepat runtuh.

Ia juga menganjurkan agar raja memperlakukan semua lapisan masyarakat secara adil, tanpa memandang etnis, suku, atau agama. Ketika muncul keluhan tentang pemerasan, korupsi, atau ketidakadilan, penguasa harus menanggapinya dengan serius dan memberikan hukuman tegas bagi pelaku. Ini bukan hanya demi menegakkan hukum, tetapi juga menunjukkan kepada rakyat bahwa raja berpihak kepada mereka.

Bagi Nizam, kekuasaan yang baik adalah yang diwarnai dengan kasih sayang, bukan ketakutan. Raja yang bersifat otoriter dan jauh dari rakyat hanya akan menciptakan jurang ketidakpercayaan dan memicu potensi pemberontakan.

8. Kebijaksanaan dalam Hukum dan Kebijakan

Hukum dan kebijakan negara harus dibuat secara hati-hati, mempertimbangkan maslahat umum, dan menghindari keputusan yang gegabah. Prinsip ini ditekankan untuk mencegah kesewenang-wenangan dalam kekuasaan.

Nizam al-Mulk mengatakan bahwa pedoman negara dan keputusan hukum harus dipertimbangkan, daripada bergegas. Ia menggarisbawahi pentingnya musyawarah (syura) sebagai proses rasional dan moral untuk merumuskan kebijakan publik.

Menurut Nizam, kebijakan yang baik bukan hanya lahir dari pengetahuan, tetapi juga dari kearifan dan intuisi politik. Setiap keputusan harus mempertimbangkan maslahat umum, dan dihindarkan dari motif balas dendam, egoisme, atau sekadar unjuk kekuasaan. Dia memperingatkan bahwa keputusan terburu-buru dan tidak jelas hanya akan mempercepat runtuhnya pemerintah.

Ia bahkan menyatakan bahwa "putusan yang benar dan adil adalah lebih baik daripada memiliki seribu tentara bersenjata" ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan dalam pemerintahan lebih penting daripada kekuatan militer dalam banyak hal.

Dengan prinsip ini, Nizam memperlihatkan kesadarannya akan pentingnya stabilitas, legitimasi, dan keberlanjutan dalam politik. Baginya, seorang pemimpin sejati adalah mereka yang mampu menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kearifan.

9. Belajar dari Sejarah

Nizam Al-Mulk kerap menggunakan kisah-kisah sejarah untuk menyampaikan pelajaran moral dan politik. Ia mengajak para penguasa untuk meneladani keberhasilan masa lalu dan menghindari kesalahan yang menyebabkan kehancuran pemerintahan sebelumnya. Salah satu aspek mempromosikan nama adalah bagaimana Nizam al-Mark menggunakan narasi historis sebagai cermin bagi manajernya. Dia percaya bahwa ceritanya adalah guru paling cerdas, dan bahwa hanya mereka yang memperhatikan jejak historis yang dapat menghindari kesalahan yang sama.

Dalam setiap bab, anekdot Nizam mengalahkan raja -raja agung di masa lalu, dari kaisar Persia hingga khalifah Islam. Ini mengundang penguasa untuk belajar dari sejarah kehilangan kekuasaan sebagai akibat dari tirani, ketidakadilan, kelalaian, atau kesalahan saat memilih konsultan. Ia menulis bahwa raja harus membaca sejarah sebagai pelajaran moral dan politik. Sejarah memberikan wawasan tentang strategi yang berhasil, kebijakan yang bijak, serta bahaya dari penyimpangan kekuasaan. Dengan begitu, sejarah bukan hanya menjadi catatan masa lalu, tetapi peta untuk menavigasi masa depan.

Prinsip ini menunjukkan bahwa Nizam bukan hanya seorang administrator, tetapi juga intelektual yang menghargai perenungan filosofis dan pembelajaran berkelanjutan dalam kepemimpinan.Hal ini membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan.(Hilmi et al., 2018).

C. Nilai Manajemen dari Perspektif Modern

a. Pentingnya Struktur Organisasi yang Jelas

Siyasat nameh dalam *Advice to Governors*, Nizam Al-Mulk menjelaskan perlunya berbagai pejabat dan departemen dari urusan militer (komandan), keuangan (pengumpul pajak, treser), keuangan (penilaian), dan penampilan pemerintah (komandan) dari pelaporan intelijen (penilaian). Dewan ini secara implisit menunjukkan bahwa perlu untuk mempertahankan kerajaan yang besar dan kompleks. Ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Ini konsisten dengan pentingnya struktur organisasi dalam manajemen modern. Organisasi modern membagi keseluruhan pekerjaan menjadi tugas yang lebih kecil (spesialisasi) dan kelompok tugas serupa di departemen (misalnya: Kementerian Keuangan, Kementerian Pemasaran, Kementerian Operasi, Sumber Daya Manusia). Tujuannya sama yaitu menciptakan bingkai yang memungkinkan penyesuaian, efisiensi, dan akuntabilitas. Struktur yang jelas memastikan bahwa semua fungsi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi akan ditangani oleh unit atau individu yang bertanggung jawab.(Kuspriatni, 2014)

b. Pemilihan dan penempatan staf yang tepat (SDM/individu)

dijelaskan oleh Nizam al-Mulk pada bab *The Advice to Governers* dalam *Siyasat Nameh*, menyarankan pihak berwenang untuk dengan hati-hati menyarankan pegawai negeri sipil, menyoroti pentingnya kesetiaan dan kualitas individu yang bertekad untuk berhasil dalam pemerintahan.

Hal yang sama berlaku untuk manajemen modern, yang merupakan inti dari fungsi manajemen SDM (HRM), terutama dalam proses perekrutan, seleksi dan penempatan. Tim manajemen modern telah menyoroti betapa pentingnya mengidentifikasi kebutuhan posisi, menentukan kualifikasi (pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kompetensi) dan menggunakan proses seleksi objektif untuk menemukan kandidat terbaik. Tujuannya adalah untuk menempatkan "orang yang tepat" (orang yang tepat di tempat yang tepat) untuk memaksimalkan kinerja organisasi. Prinsip yang sama adalah pengakuan bahwa keberhasilan perusahaan (negara bagian atau perusahaan) sangat bergantung pada kualitas, kemampuan, dan harmoni orang-orang yang memainkan peran penting di dalamnya. Kriteria dapat bervariasi, tetapi tujuan (kinerja yang efektif oleh staf yang kompeten) adalah sama. (Mu`tafi, 2020)

c. Konsultasi dan Penggunaan keahlian (aplikasi pengambilan keputusan dan keahlian)

Nizam al-Mulk "*Advice to Governors*" dari *Siyasat nameh* secara eksplisit menyarankan pihak berwenang untuk mencari nasihat, pengalaman, dan pengetahuan daripada mengambil semua tindakan (Ulama, Penasihat Senior). Dia menyoroti bagaimana pihak berwenang menyarankan orang -orang yang berpengalaman sebelum membuat keputusan. Ini mencerminkan nilai -nilai kontemporer dari keputusan dan menggunakan pengetahuan khusus. Misalnya; Manajer modern didorong untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan berkonsultasi dengan ahli internal atau eksternal, kolega, atau tim sebelum keputusan penting dibuat. Prinsipnya sama.

menemukan input positif dari orang -orang yang mengakui keterbatasan pengetahuan individu (penguasa/manajer) dan memiliki keahlian yang relevan untuk meningkatkan kualitas keputusan mereka.

d. Pengawasan dan Kontrol (Pengamatan dan Kontrol)

Nizam al-Mulk pada bab *Advice to Governors* merekomendasikan agar pihak berwenang memiliki sistem pengawasan yang mencakup penggunaan mata-mata setia untuk memantau kegiatan resmi, bahkan di negara bagian dan istana yang panjang itu sendiri. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pihak berwenang dilaksanakan, mencegah korupsi, mengakui kemungkinan pemberontakan dan hambatan, dan memastikan bahwa masalah negara dilakukan atas keinginan pihak berwenang. Ini mengacu pada salah satu fungsi manajemen inti dari fungsi pemantauan dan kontrol (bersama dengan perencanaan, organisasi dan kepemimpinan). Ini termasuk menentukan kriteria kinerja, mengukur kinerja aktual, dibandingkan dengan standar, dan memperkenalkan pengukuran korektif dalam kasus penyimpangan. Mekanisme meliputi gelar, audit internal/eksternal, sistem pelaporan manajemen, penilaian kinerja karyawan, dan metrik operasional. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi dilakukan sesuai dengan rencana, sumber daya digunakan secara efisien, tujuan tercapai, dan potensi masalah serta penyimpangan (termasuk penipuan dan ketidakefisienan) diakui dan ditingkatkan. (Mutakallim, 2016)

2. Strategi Pemilihan Budak dalam Qabus Nameh

A. Latar Belakang Historis dan Tujuan Penulisan Qabus Nameh

Qabus nameh ditulis sekitar 1082/1083 oleh Amir Kai Kaus ibn Iskandar, seorang penguasa lokal Dinasti Ziyarid di Iran Utara. Di bawah pengaruhnya, saya menciptakan jiyarid. Latar belakang historis ini dibentuk oleh lanskap politik yang kadang-kadang tidak hanya menjadi tidak stabil, tetapi juga menjadi berlimpah berlimpah dalam budaya Persia, menciptakan kebutuhan manajer dan bangsawan untuk memiliki panduan komprehensif untuk perilaku, etika, kelangsungan hidup, dan pengembangan di dunia yang kompleks. Pekerjaan ini lahir dari tradisi panjang nasihat Persia untuk elit (Jameskritzeck).

Tujuan utama penulisan *Qabus nameh* adalah untuk memberi penulis Gilanshah yang komprehensif dan nasihat mendalam ketika mewarisi posisi kepemimpinan. Kai Kaus ingin memberi putranya dengan ajaran prinsip-prinsip etika pribadi, pedoman untuk interaksi di berbagai tingkat masyarakat, pengetahuan tentang berbagai pekerjaan, dan yang terpenting, prinsip-prinsip pemerintahan yang adil dan bijak. Qabusnameh bertindak sebagai kebijaksanaan ayahnya dan sebagai panduan praktis bagi penguasa muda potensial untuk berhasil dan menjalani kehidupan yang terhormat sesuai dengan nilai -nilai zamannya(Jameskritzeck).

B. Pedoman-Pedoman Utama dalam Purchase of Slaves

Berdasarkan hasil analisis dalam buku Anthology of Islamic literature by James Kritzeck dalam Kai Kaus (*Qabus nameh*) pada bab *The Purchases of slaves* terdapat nasihat yang disampaikan mengenai strategi dalam pemilihan budak. Kai kaus memandang pembelian budak bukan hanya sebagai kegiatan ekonomi, melainkan sebagai sebuah seni yang ia anggap sebagai cabang dari filsafat. Pandangan ini mengisyaratkan bahwa menilai manusia memerlukan keahlian dalam ilmu firasat dan pengalaman hidup. Dalam *The purchase of slaves*, ciri-ciri fisik budak dijelaskan secara rinci sesuai dengan fungsi mereka, mulai dari teman pribadi, musisi, prajurit hingga pekerja rumah tangga.

Dinyatakan Dalam *The Purchase of Slaves* dalam buku Anthology of Islamic Literature By James Kritzeck dinyatakan bahwa,

a. untuk memilih seorang budak yang akan dijadikan atau dibeli untuk melayani pribadi dan sebagai teman bersosialisasi adalah harus memiliki tubuh yang sedang, tidak tinggi atau pendek, tidak gemuk atau kurus, tidak pucat atau kemerahan, tidak terlalu kekar atau terlalu langsing, dan rambutnya tidak keriting maupun terlalu lurus.
b. Untuk memilih seorang budak yang dijadikan musisi adalah tidak terlalu kurus atau gemuk, tangannya harus lembut, dengan jari tengah Panjang, wajahnya cerah, kulitnya kencang, rambutnya tidak terlalu Panjang, tidak terlalu pendek, tidak terlalu hitam dan telapak kaki sebaiknya seimbang.
c. Untuk budak yang dijadikan sebagai prajurit adalah rambut tebal, tubuh tinggi dan tegak, tubuh kuat, daging keras, tulang tebal, kulit kasar, anggota tubuh lurus, sendi kuat, urat dan pembuluh darah menonjol dan tampak jelas. Bahunya harus lebar, dada dalam, leher tebal, kepala bulat, dan sebaiknya botak. Perutnya harus cekung, pantat masuk ke dalam, dan kaki harus panjang saat berjalan. Matanya harus hitam.
d. Dan budak yang dijadikan untuk pekerja rumah tangga adalah berkulit gelap, berwajah masam, anggota tubuh kering keriput, rambut jarang, suara melengking, kaki kecil, bibir tebal, hidung pesek, jari-jari pendek, postur bungkuk, dan leher tipis.

Pernyataan tersebut tidak hanya memberikan petunjuk praktis, tetapi juga menunjukkan bagaimana tubuh manusia dikonstruksi dan diklasifikasi berdasarkan fungsi sosial serta standar estetika tertentu. *The Purchase of Slaves dalam Qabus-nameh* juga mengandung penilaian bernuansa terhadap ras dan bangsa melalui stereotip yang disampaikan secara jelas namun kompleks. Orang Turki, misalnya, dipuji karena segar dan andal dalam kerja rumah tangga, tetapi juga dikritik karena dinilai kasar dan sulit dipuaskan. Kontras ini menunjukkan ambivalensi moral dalam teks, sebuah upaya untuk menyampaikan pujian dan peringatan secara seimbang. Dalam konteks ini, bagian *The Purchase of Slaves* bukan hanya berfungsi sebagai panduan bagi pangeran, tetapi juga sebagai cermin budaya yang memperlihatkan bagaimana sastra digunakan untuk mengukuhkan hierarki sosial dan membentuk tubuh manusia melalui bahasa nasihat. Karena itu, teks ini bisa dibaca sebagai wujud kekuasaan yang bekerja melalui klasifikasi dan normalisasi, sekaligus sebagai karya sastra yang mengandung ketegangan antara nilai etika dan struktur sosial.

C. Interpretasi Modern Terhadap Nasihat Kai Kaus

Qabus Nameh, karya monumental Kai Kaus ibn Iskandar sebagai panduan hidup untuk putra kesayangan dan penerusnya Gilanshah yang ditulis pada tahun 475/1082 , merupakan salah satu dokumen sastra Persia yang menggambarkan perpaduan antara kebijaksanaan praktis dan pandangan dunia abad pertengahan(Sadr, 2016). Dalam bab *The Purchase of Slaves*, Kai Kaus menyampaikan panduan yang tampaknya sederhana namun kaya akan muatan nilai, struktur sosial, dan refleksi atas kodrat manusia. Meskipun isi bagian ini bertumpu pada sistem perbudakan yang hari ini dipandang tidak etis, nasihat-nasihat tersebut dapat dimaknai ulang melalui pendekatan kritis dan multidisipliner untuk memahami bagaimana manusia, kekuasaan, dan moralitas diposisikan.

Kai Kaus menulis dalam tradisi *mirror for princes* yaitu salah satu genre sastra politik yang memuat nasihat etis, spiritual dan praktis yang ditujukan kepada raja atau pemimpin sebagai panduan dalam menjalankan kekuasaan(Lambertini, 2011), yakni karya yang berfungsi membentuk pemimpin muda

melalui nasihat moral dan politik. Ini dapat disejajarkan dengan literatur manajemen kepemimpinan modern yang menekankan pembentukan karakter, etos kerja, dan integritas. Ia tidak sekadar memberi petunjuk praktis, tetapi berusaha menciptakan seorang penguasa yang mampu menimbang keputusan secara bijak. Dalam hal ini, *Qabus Nameh* memiliki kesamaan dengan pemikiran Foucault tentang *governmentality* bagaimana kekuasaan bekerja bukan dengan memerintah secara langsung, tetapi dengan membentuk cara orang bertindak, berpikir, dan mengelola diri mereka sendiri(Curtis, 2002).

Salah satu aspek menarik adalah penekanan Kai Kaus terhadap ilmu firasat sebagai alat untuk memahami manusia. Dalam konteks kontemporer, hal ini dapat dilihat sebagai bentuk awal dari psikologi sosial usaha untuk membaca kepribadian dari penampilan dan gestur(Mustafa, 2011). Konsep ini sejajar dengan pemikiran-pemikiran modern tentang kecerdasan interpersonal dan pentingnya empati dalam kepemimpinan.

Namun, teks ini juga menyimpan warisan problematis, khususnya dalam penggolongan rasial dan stereotip yang diberlakukan pada berbagai etnis. Kai Kaus menyusun daftar karakteristik baik dan buruk dari berbagai ras, suatu hal yang dalam dunia akademik modern dibaca sebagai bentuk wacana kekuasaan yang diskriminatif. Pendekatan postkolonial, seperti yang dikembangkan Frantz Fanon dan dalam pandangannya postkolonialisme diperbesar ke dalam ranah identitas, dimana hal tersebut diakui sebagai penyebab munculnya krisis identitas dalam masyarakat pasca-kolonial(Mustafa, 2011). Dan hal tersebut dapat digunakan untuk membedah bagaimana konstruksi identitas etnis dalam teks ini menjustifikasi relasi kuasa dan dominasi.

Tidak hanya itu, Kai Kaus membedakan jenis pekerjaan yang cocok bagi budak berdasarkan ciri fisik dan temperamen. Ia merinci secara sistematis budak mana yang cocok untuk seni, kerja rumah tangga, hingga militer. Meskipun terlihat sebagai praktik diskriminatif, dalam interpretasi modern hal ini bisa dianggap sebagai bentuk awal dari asesmen kepribadian atau "psikometri tradisional." Prinsip bahwa seseorang sebaiknya diberi tugas sesuai dengan kemampuannya tetap relevan, meskipun hari ini kita menolaknya bila disertai unsur rasialisme.

Teks ini juga mengandung nilai etis tersirat. Kai Kaus berulang kali memperingatkan agar tidak menilai seseorang secara gegabah, dan menyarankan agar penilaian dilakukan dengan seksama dan hati-hati. Ia juga menekankan pentingnya kelembutan dan kejujuran sebagai nilai utama, meskipun dibungkus dalam konteks pemilikan budak. Secara kritis, ini dapat diinterpretasikan sebagai seruan awal untuk kepemimpinan yang manusiawi dan penuh tanggung jawab moral.

Akhirnya, *Qabus Nameh* bukan sekadar nasihat praktis bagi seorang pangeran, tetapi juga jendela untuk memahami bagaimana suatu masyarakat memandang manusia, tubuh, etnisitas, dan kekuasaan. Dalam kerangka interpretasi modern, teks ini menjadi ruang diskusi yang kaya, di mana kita tidak hanya menemukan nilai-nilai moral, tetapi juga kontradiksi sejarah yang harus dibaca secara kritis agar tidak terjebak dalam romantisasi masa lalu.

3. Komparasi: Relasi Kekuasaan dalam Dua Skala

Perbedaan utama dalam relasi kekuasaan antara *Siyasatnama* dan *Qabusnameh* terletak pada cakupan dan fokusnya. *Siyasatnama* beroperasi pada skala sistemik, membahas bagaimana raja harus mengatur negara secara keseluruhan untuk mencapai keadilan dan stabilitas bagi seluruh rakyat. Ini

mencakup struktur organisasi pemerintahan, manajemen sumber daya, dan pengawasan yang luas. Relasi kekuasaan di sini adalah antara penguasa dan rakyatnya, serta antara pusat kekuasaan dan berbagai departemen pemerintahan.

Sementara itu, *Qabusnameh* berfokus pada relasi kekuasaan yang bersifat personal, khususnya dalam konteks interaksi antara majikan dan budak. Nasihatnya lebih detail dan spesifik tentang bagaimana memilih individu berdasarkan karakteristik pribadi mereka untuk tujuan tertentu. Meskipun skalanya lebih kecil, kedua karya ini sama-sama penting dalam memberikan wawasan tentang etika kepemimpinan dan manajemen dalam tradisi Islam klasik. *Siyasatnama* menawarkan model pemerintahan yang ideal, sementara *Qabusnameh* memberikan panduan praktis untuk interaksi interpersonal, keduanya mencerminkan kompleksitas relasi kekuasaan dalam masyarakat Persia pada masanya.

Kedua karya ini, meskipun berbeda dalam skala, saling melengkapi dalam gambaran lengkap tentang bagaimana kekuasaan dipahami dan dijalankan pada masa itu. *Siyasatnama* memberikan fondasi makro untuk tata kelola yang adil dan efisien, sementara *Qabusnameh* menyoroti pentingnya penilaian individu dan manajemen sumber daya manusia pada tingkat mikro. Dengan mengkaji kedua karya ini secara kritis, kita dapat memahami bagaimana nilai-nilai etika, kekuasaan, dan struktur sosial dibentuk dan diwariskan, serta relevansinya untuk kepemimpinan dan manajemen modern

Analisis komparatif kedua karya ini juga menunjukkan relevansi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan teori manajemen modern, terutama dalam konteks relasi kekuasaan. Dari *Advice to Governors*, prinsip-prinsip seperti pentingnya struktur organisasi yang jelas, pemilihan dan penempatan staf yang tepat (SDM/individu), konsultasi dan penggunaan keahlian, serta pengawasan dan kontrol secara langsung mencerminkan fungsi manajemen inti. Lebih lanjut, nasihat untuk mencari nasihat, pengalaman, dan pengetahuan dari ulama dan penasihat senior sebelum membuat keputusan penting menunjukkan penghargaan terhadap konsultasi dan penggunaan keahlian. Ini beresonansi dengan praktik manajemen modern di mana manajer didorong untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan berkonsultasi dengan ahli internal atau eksternal untuk meningkatkan kualitas keputusan. Pengawasan dan kontrol melalui sistem intelijen setia yang memantau kegiatan resmi juga merupakan fungsi manajemen inti yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai rencana, sumber daya digunakan secara efisien, dan tujuan tercapai, serta mengidentifikasi potensi masalah.

Relasi kekuasaan yang digambarkan dalam *Qabusnameh* lebih bersifat hirarki personal antara majikan dan budak. Namun, di balik praktik tersebut, terdapat nilai etis tersirat yang ditekankan Kai Kaus. Ia memperingatkan agar tidak menilai seseorang secara gegabah, menekankan pentingnya kehati-hatian, kelembutan, dan kejujuran dalam penilaian. Ini mengindikasikan seruan awal untuk kepemimpinan yang manusiawi dan bertanggung jawab secara moral, bahkan dalam konteks kepemilikan budak. Dengan demikian, *Qabusnameh* mengajarkan bahwa relasi kekuasaan pada tingkat individu memerlukan pemahaman mendalam tentang karakter manusia, observasi yang cermat, dan penilaian yang hati-hati, meskipun dalam kerangka sosial yang berbeda dari masa kini.

Kedua karya tersebut secara kolektif menunjukkan bahwa pemikir klasik telah meletakkan dasar-dasar pemikiran manajemen yang canggih, yang tetap relevan hingga saat ini. Mereka tidak hanya berfokus pada kekuasaan sebagai otoritas, tetapi juga sebagai tanggung jawab yang memerlukan strategi, etika, dan

pemahaman mendalam tentang manusia dan sistem. Perbedaan kedua karya tersebut bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Perbedaan kekuasaan dalam Advice to Governors dan Purchase of Slaves

Aspek	Siyasatnama (Nizam al-Mulk) – *Advice to Governors*	Qabusnameh (Kai Ka'us) – The *Purchase of Slaves*
Fokus Utama	Nasihat tentang seni mememrintah dan pengelolaan pemerintah	Nasihat tentang cara memilih,membeli, dan memahami karakter budak
Tujuan Penulisan	Menyediakan panduan bagi raja dan pejabat untuk mencapai keadilan,stabilitas, dan kemakmuran negara.	Memberikan panduann praktis dan filosifis dalam memilih nudak yang berkualitas dan sesuai kebutuhan.
Nilai yang Ditekankan	Keadilan, kebijaksanaan, stabilitas,loyalitas, ilmu pengetahuan, keuangan negara, hubungan rakyat-penguasa	Firasat, kehati-hatian, Pemahaman karakter manusia, pengamatan fisik.
Metode yang Disarankan	Menunjuk wazir yang bijaksana Menggunakan jaringan intelijen Pengelolaan tantara dan keuangan	Observasi mendetail pada fisik budak. Mengandalkan firasat dan pengalaman Mengenali penyakit tersembunyi Memahami asal-usul ras budak dan karakter umum
Pendekatan Umum	Strategi, sistematis, berbasis negara dan Masyarakat luas	Individual, detail, berbasis hubungan personal dan fungsi kerja budak.
Sumber inspirasi	Prinsip islam, pengalaman pemerintahan Persia, tradisi administratif klasik.	Filosofi tentang sifat manusia, pengalaman empiris, dan kebijaksanaan praktis sehari-hari
Konteks Sosial dan Politik	Pemerintahan skala besar: Kestabilan Kerajaan dan masyarakat	Hubungan personal dan ekonomi: interaksi antara majikan dan budak

KESIMPULAN

Penelitian ini membahas dua karya sastra politik Islam klasik, yaitu *Siyasat nameh* karya Nizam al-Mulk dan *Qabus nameh* karya Kai Kaus. Keduanya termasuk dalam genre mirror for princes, yaitu karya sastra yang berisi nasihat bagi para pemimpin agar dapat menjalankan kekuasaan dengan bijak dan adil. Namun, kedua karya ini memiliki pendekatan yang berbeda.

Siyasatnama berfokus pada tata kelola pemerintahan dalam skala besar. Isinya menekankan pentingnya keadilan, pemilihan menteri yang cakap, sistem pengawasan yang kuat, pengelolaan keuangan negara, serta peran ilmu dan pendidikan dalam memperkuat negara. Nilai-nilai ini sangat relevan dengan prinsip-prinsip manajemen modern, seperti pentingnya struktur organisasi yang jelas, rekrutmen berdasarkan kompetensi, dan pengambilan keputusan berbasis konsultasi dan data.

Sementara itu, *Qabus nameh* lebih menyoroti aspek hubungan personal antara majikan dan budak. Dalam bab *The Purchase of Slaves*, Kai Kaus memberikan panduan yang detail tentang cara memilih budak berdasarkan ciri fisik dan karakter. Meskipun bagian ini mencerminkan pandangan sosial masa lalu yang kini dianggap bermasalah, terutama dalam hal stereotip etnis, tetapi juga menunjukkan upaya untuk memahami manusia secara mendalam, yang dalam konteks sekarang bisa dihubungkan dengan konsep

psikologi kepribadian atau asesmen kerja.

Kedua karya tersebut menunjukkan bahwa para pemikir Islam klasik telah memikirkan berbagai aspek kekuasaan secara serius, baik dari segi pemerintahan negara maupun hubungan antarindividu. Dengan membaca dan mengkaji ulang karya-karya ini secara kritis, kita dapat memahami bagaimana nilai-nilai etika, kekuasaan, dan struktur sosial dibentuk dan diwariskan, serta bagaimana nilainya masih dapat digunakan sebagai bahan refleksi dalam konteks kepemimpinan dan manajemen masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A. H. (2020). *Muslim Specula Principum : The Art of Islamic Governance*. *1*, 66–83.

Curtis, B. (2002). Foucault on governmentality and population: The impossible discovery. *Canadian Journal of Sociology*, *27*(4), 505–533. https://doi.org/10.2307/3341588

Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2018). *Nizam Al mulk dan Kontribusinya terhadap pemikiran politik islam*. *3*(2), 91–102.

Kritzeck, James. (1964). Anthology of Islamic Literature. Penguin Books

Kuşakcı, S., & İyigün, N. Ö. (2017). An Ethical Administration Trilogy: The Concepts of Integrity, Justice, and Benevolence Based on Kutadgu Bilig and Siyasat-Nama. *Turkish Journal of Business Ethics*, *10*(1), 115–145. https://doi.org/10.12711/tjbe.2017.10.1.0001

Kuspriatni, L. (2014). Struktur dan Anatomi Organisasi. *Perilaku Keorganisasian*, *8*(12), 1–8.

Lambertini, R. (2011). Encyclopedia of Medieval Philosophy. *Encyclopedia of Medieval Philosophy*, *Mc*. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9729-4

Mu`tafi, A. (2020). Pilar-Pilar Manajemen Sumber Daya Manusia (Msdm) Dalam Menghadapi Era Global. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, *20*(2), 106–125. https://doi.org/10.32699/mq.v20i2.1710

Mustafa, H. (2011). Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial. *Jurnal Administrasi Bisnis*, *7*(1), 143–156. https://doi.org/10.1159/000074314

Mutakallim. (2016). Pengawasan, Evaluasi dan Umpan Balik Stratejik. *Volume V, Nomor 2*, *V*(Juli-Desember 2016), 351–365.

Sadr, A. A. (2016). When the Subject is the Object: Islamic Advice Literature Modes and the Treatment of Slavery in the Qābūs Nāmih and the Nasirean Ethics. *Iranian Studies*, *49*(3), 435–449. https://doi.org/10.1080/00210862.2014.987506